

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah

¹Karlina Ghazalah Rahman, ²Yuli Permatasari, ³Eka Candrakasih T

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia,
Indonesia

E-mail: karlina@stienobel-indonesia.com, yulipermatasari@gmail.com,
ekacandra@gmail.com³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang diukur berdasarkan rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan pada tahun anggaran 2010-2012. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulann data yang dilakukan adalah dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi APBD. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan rumus kinerja keuangan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010-2012 tergolong baik jika ditinjau dari tingkat kemandirian, tingkat efektivitas, dan tingkat keserasian, sedangkan jika ditinjau dari tingkat efisiensi tergolong cukup baik, dan bila ditinjau dari pertumbuhan masih kurang baik.

Kata kunci: kinerja keuangan pemerintah, kemandirian daerah, efektivitas dan efisiensi

Abstract

The purpose of this study is to analyze the financial performance of the local government of Banggai Islands Regency as measured by pad effectiveness ratio, regional financial efficiency ratio, harmony ratio, and growth ratio in the 2010-2012 fiscal year. This research uses quantitative methods with a descriptive approach. The data collection technique carried out is to use secondary data in the form of an APBD realization report. The data analysis technique used is descriptive analysis using the government's financial performance formula. The results showed that the financial performance of the Banggai Islands Regency Government for the 2010-2012 Fiscal Year was relatively good in terms of the level of independence, level of effectiveness, and level of harmony, while in terms of efficiency level it was quite good, and when viewed from growth was still not good.

Keywords: government financial performance, regional independence, effectiveness and efficiency

1. Introduction

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberi kesempatan bagi kinerja daerah dalam penyelenggaraan pemerintah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi daerah yang secara resmi dimulai pada tahun 1999 tersebut, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu dapat dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal. Dalam era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas mengakibatkan semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pemerintahan yang baik ditandai dengan empat pilar utama yang merupakan elemen dasar utama yang paling terkait satu dengan yang lain.

Keempat elemen tersebut adalah kejujuran, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu

pemerintahan yang baik selain harus menjunjung tinggi kejujuran juga harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait didalamnya dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif. Disamping itu jalannya pemerintahan juga harus diselenggarakan secara transparan dan selanjutnya pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan (Doornbos, 2019).

Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah merupakan daerah otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin. Perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal apabila setiap tingkat pemerintahan dapat secara independen mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerahnya masing-masing. Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah daerah adalah dalam bidang keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan salah satu unsur yang penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah (Syairozi et al., 2021).

Hal ini menyebabkan diperlukannya suatu pertanggungjawaban keuangan daerah yang memadai. Pertanggungjawaban yang memadai harus mempunyai sifat mudah dimengerti dan memiliki hubungan informasi yang mencerminkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam keuangan daerah memiliki dimensi dan cakupan.

Pengaruh yang sangat besar bagi daerah yang bersangkutan. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan pengelolaan pemerintah yang baik (Halim, 2013) . Kelemahan utama dalam manajemen keuangan daerah adalah tidak adanya ukuran kinerja yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan, ratifikasi, implementasi dan evaluasi terhadap keuangan daerah.

Selama ini satu-satunya ukuran kinerja yang ada adalah ukuran kinerja yang ditentukan oleh pemerintah pusat yaitu aturan bahwa belanja daerah baik belanja aparatur daerah maupun belanja pelayanan publik yang tertera dalam APBD adalah jumlah maksimal yang dapat dibelanjakan untuk setiap pos belanja daerah (Hasanah & Vidiyastutik, 2018). Kinerja belanja daerah disebut baik apabila realisasinya sesuai dengan target yaitu semua dana belanja daerah dihabiskan pada tahun yang bersangkutan. Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi..

Penelitian terkait kinerja keuangan pernah diteliti oleh Rahman dan Rachman (2021) bahwa kinerja keuangan pengelolaan keuangan di pemerintah daerah harus menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, responsif, pertanggungjawaban dsb. Komponen ini merupakan bagian dari penyelenggaraan *good governance* yang menjadi pondasi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan. Lalu, ada penelitian yang dilakukan oleh Sulisty (2018) bahwa analisis kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan hasil yang baik bila dilihat dari tingkat independensi, tingkat kemampuan, dan tingkat efektivitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang diukur berdasarkan rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan pada tahun anggaran 2010-2012.

2. Literature Review

1. Contingency Theory

Contingency theory berlandaskan pada suatu konsep yang menyatakan bahwa pengelolaan organisasi atau perusahaan melalui penerapan *management control systems* yang dimiliki dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila pemimpin organisasi atau perusahaan mampu memperhatikan, menganalisis, dan memecahkan berbagai situasi tertentu yang sedang dihadapi secara terpisah, dimana kemudian pemimpin mampu merancang dan menerapkan *management control systems* yang tepat dan sesuai untuk masing-masing situasi yang sedang dihadapi tersebut, sehingga kemudian dapat meningkatkan *performance* dan *financial performance* dari perusahaan atau organisasi lainnya.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah

Menurut (Sari et al., 2016) kinerja keuangan pemerintah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil

kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD) bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Menurut (Halim, 2013) beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah adalah sebagai berikut.

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan

total pendapatan daerah.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

2) Rasio Efektivitas terhadap PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

3) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima. (Abdul Halim, 2007:234) kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

4) Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja Pendapatan Daerah pelayanan publik secara optimal.

$$\text{Rasio Belanja Aparatur Daerah Terhadap APBD} =$$

$$\frac{\text{Total Belanja Aparatur Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pelayanan Publik Terhadap APBD} =$$

$$\frac{\text{Total Belanja Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5) Rasio Pertumbuhan (Analisis Shift)

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya, yang dapat dihitung dengan formula sebagai berikut.

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

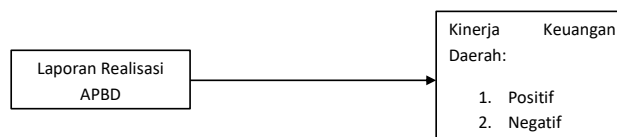
Keterangan :

r = Pertumbuhan (dalam persen)

P_n = Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun ke - n

P_o = Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun awal sebelumnya

3. Kerangka Konseptual



Gambar 1: Kerangka Konseptual

Laporan realisasi APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah akan dijadikan alat untuk mengukur apakah kinerja keuangan daerah positif atau negatif.

4. Hipotesis

Kinerja keuangan dapat dikatakan baik jika pengelolaan organisasi yang dimiliki berjalan lancar dan didorong oleh pimpinan yang mampu memperhatikan jalannya organisasi. Hal ini sesuai dengan *contingency theory* dimana kemudian pemimpin mampu merancang dan menerapkan *management control systems* yang tepat dan sesuai untuk masing-masing situasi yang sedang dihadapi tersebut, sehingga kemudian dapat meningkatkan *performance* dan *financial performance* dari perusahaan atau organisasi lainnya. Penelitian ini pernah dilakukan oleh Sulisty (2018) bahwa analisis kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan hasil yang baik bila dilihat dari tingkat independensi, tingkat kemampuan, dan tingkat efektivitas.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah kabupaten Banggai provinsi Sulawesi Selatan bernilai positif.

3. Methodology

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulann data yang dilakukan adalah dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi APBD. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan rumus kinerja keuangan pemerintah berdasarkan (Halim, 2013). Proxy penelitian ini adalah kemandirian daeran, efektifitas, efisiensi, keserasian, dan pertumbuhan.

4. Discussion

Tabel 1

Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010-2012

No	Jenis Pendapatan	Jenis Pendapatan 2010	Tahun Anggaran (Realisasi) 2011	Tahun Anggaran (Realisasi) 2012
1	PAD (Rp)	525,089,023,791.00	759,801,341,723.00	1,100,578,022,510.82
	a. Pajak Daerah	477,676,223,317.00	698,514,183,884.00	998,259,456,088.98
	b. Retribusi Daerah	15,202,308,068.00	20,794,064,205.00	30,664,926,564.52
	c. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,102,464,616.00	13,102,464,616.00	13,102,464,616.00
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	19,108,027,790.00	24,371,556,552.00	42,533,734,162.88
2	Dana Perimbangan (Rp)	399,982,042,037.00	426,187,242,596.00	518,084,053,822.24
	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	100,379,042,037.00	124,475,451,596.00	135,965,074,711.99
	b. Dana Alokasi Umum	263,808,000,000.00	265,916,791,000.00	337,801,504,439.81
	c. Dana Alokasi Khusus	35,795,000,000.00	35,795,000,000.00	44,317,474,670.43
	d. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi			
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah (Rp)	52,256,811,563.00	67,499,293,200.00	252,206,737,094.71
	a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	28,900,246,563.00	31,366,653,000.00	50,441,347

No	Jenis Pendapatan	Jenis Pendapatan 2010	Tahun Anggaran (Realisasi) 2011	Tahun Anggaran (Realisasi) 2012
	Lainnya			
	b. Pos Penerimaan Bantuan Dana Pilkada dari APBN			
	c. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus	10,000,000,000.00	10,616,116,200.00	28,449,361,292
	d. Pos Sumbangan Pihak Ketiga	2,631,565,000.00	12,003,029,000.00	136,191,638,031
	e. Pos Hibah (dana bencana alam)	725,000,000.00	13,495,000.00	37,831,010,564
	f. Dana Darurat	10,000,000,000.00	13,500,000,000.00	49,634,285,860
	Total Pendapatan Daerah (Rp)	977,327,877,391.00	1,253,487,877,519.00	1,870,868,813,427.77
	Rasio Kemandirian (%)	53.73	60.61	58.83
	Rata-Rata Rasio Kemandirian	57.72		

Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, data diolah (2022)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 1 bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2010, 2011, dan 2012 adalah sebesar 53,73%, 60,61%, dan 58,83%. Sesuai dengan Tabel 1 halaman 26 maka dapat diketahui bahwa pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun anggaran 2010, 2011, dan 2012 berada pada tingkat kemandirian dengan interval 50-75 persen. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai pola hubungan partisipatif, dimana peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. Ini berarti pula bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan termasuk dalam kategori sedang.

Tabel 2
 Perhitungan Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Terhadap

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010-2012.

Tahun Anggaran	Total Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Total Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	869.263.345.393	977.327.877.391	88,94
2011	1.074.683.238.557	1.253.487.877.519	85,74
2012	1.634.016.821.648	1.870.868.813.428	87,34
Rata-rata Rasio	Efisiensi Tahun	2010-2012	87,34%

Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, data diolah (2022)

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa rasio efisiensi belanja daerah terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2010 adalah sebesar 88,94%, pada tahun 2011 adalah sebesar 85,74% dan tahun 2012 adalah sebesar 87,34% atau sesuai dengan Tabel 2 tergolong kriteria cukup efisien, karena berada pada interval 80-90 persen. Hal ini disebabkan oleh realisasi pendapatan daerah yang sedikit lebih besar daripada realisasi belanja daerah. Rata-rata rasio efisiensi belanja daerah terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2010-2012 sebesar 87,34% dan tergolong pada kriteria cukup efisien. Mardiasmo (2002:159) menyatakan bahwa selama ini pemerintah daerah menggunakan aturan bahwa jumlah belanja daerah yang tertera pada APBD adalah jumlah maksimum yang dapat dibelanjakan untuk setiap pos belanja daerah, sehingga ada kecenderungan untuk menghabiskan semua dana belanja daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan. Tetapi Kabupaten Banggai Kepulauan telah cukup berhasil untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah.

Tabel 3

Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010-2012

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (3):(2)
2010	408.375.462.271	525.089.023.791	128,58
2011	620.631.469.868	759.801.341.723	122,42
2012	862,371,044,276	1,100,578,022,511	127,62
Rata-rata Rasio	Efektivitas Tahun	2010-2012	126,21%

Sumber: APBD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa rasio efektivitas PAD tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2012 secara berturut-turut adalah sebesar 128,58%, 122,42%, dan 127,62%, dimana realisasi total PAD berada di atas anggaran PAD yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh pajak daerah dan retribusi daerah, realisasinya berada di atas anggaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pedoman penilaian dan kinerja keuangan, maka tingkat efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah sangat efektif, karena berada pada interval diatas 100 persen.

Tabel 4
 Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Daerah Pemerintah
 Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010-2012.

No	Uraian	Tahun Anggaran		
		2010	2011	2012
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Total Belanja Aparatur Daerah (Belanja TidakLangsung)	435.208.210.691	595.616.468.992	910.800.976.386
2	Total Belanja Pelayanan Publik (Belanja Langsung)	434.055.134.702	479.066.769.566	723.215.845.261
3	Total Belanja Daerah	869.263.345.393	1.074.683.238.557	1,634,016,821,644
		%	%	%
4	(Total Belanja Aparatur Daerah/Total Belanja Daerah)x100%	50,07	55,42	55.74
5	(Total Belanja Pelayanan Publik/Total Belanja Daerah)x100%	49,93	44,58	44.26
	Rata-rata Total Belanja Aparatur Daerah/Total Belanja Daerah	53,74%		
	Rata-rata Total Belanja Pelayanan Publik/Total Belanja Daerah	46,26%		

Sumber: APBD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa total belanja aparatur daerah terhadap total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun anggaran 2011 sebesar 50,07%, tahun anggaran 2010 sebesar 55,42%, dan tahun anggaran 2012 sebesar 55,74% sehingga rata-rata total belanja aparatur daerah terhadap total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk tahun anggaran 2010-2012 sebesar 53,74%. Total belanja pelayanan publik terhadap total belanja daerah pada tahun anggaran 2010 sebesar 49,93%, tahun anggaran 2011 sebesar 44,58%, dan tahun anggaran 2012 sebesar 44,26% sehingga rata-rata total belanja pelayanan publik terhadap total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2010-2012 sebesar 46,26%. Selama tahun anggaran 2010-2012 tersebut terlihat bahwa rata-rata alokasi belanja pelayanan publik lebih besar dari pada belanja aparatur daerah. Dapat dilihat dari tahun ke tahun belanja publik mengalami kenaikan dan belanja publik mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik.

Tabel 4

Berikut ini Menyajikan Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2011-2012

No	Sumber PAD	Tahun Anggaran		Rata-rata (%)
		2011 (%)	2012 (%)	
1.	Pajak Daerah	46,23	42,91	44,57
2.	Retribusi Daerah	36,78	47,47	42,13
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan	23,04	80,63	51,84
4.	Lain-lain PAD	27,55	74,52	51,04
Rata-rata Pertumbuhan PAD		33,40	61,38	47,39

Sumber: APBD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4 maka rata-rata pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk tahun 2011 terhadap tahun sebelumnya menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 33,40%. Pertumbuhan PAD terbesar terjadi pada pajak daerah sebesar 46,23%, sedangkan pertumbuhan PAD terkecil terjadi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan yaitu sebesar 23,04%. Pada tahun 2012 rata-rata pertumbuhan PAD mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 61,38%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan retribusi daerah sebesar 47,47%, peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan sebesar 80,63% dan lain-lain PAD sebesar 74,52%. Namun terjadi penurunan pada bagian pajak daerah sebesar 42,91% Rata-rata pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama tahun 2011-2012 sebesar 47,39% persen dan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini memberikan gambaran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

5. Conclusions

Berdasarkan pembahasan dan hasil evaluasi yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010-2012 tergolong baik jika ditinjau dari tingkat kemandirian, tingkat efektivitas, dan tingkat keserasian, sedangkan jika ditinjau dari tingkat efisiensi tergolong cukup baik, dan bila ditinjau dari pertumbuhan masih kurang baik.

References

- Doornbos, M. (2019). 'Good Governance': The Rise and Decline of a Policy Metaphor? *Changing the Conditions for Development Aid*, 93–108. <https://doi.org/10.4324/9781315827834-5>
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) Koran - Google Buku* (3rd ed.). https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Qf4QHM1Mud0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=abdul+halim+akuntansi&ots=JscIVmpHkX&sig=OHpI-PkEiuRqRzrA-DRLrdWPjnI&redir_esc=y#v=onepage&q=abdul%20halim%20akuntansi&f=false
- Hasanah, N., & Vidiyastutik, E. D. (2018). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Ecobuss*, 6(2), 26–35.

<https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ecobuss/article/view/338>

- Rahman, K. G., & Rachman, S. H. (2021). *Pengaruh Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar*. 2, 25–31.
- Sari, I. P., Agusti, R., & Rofika, R. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/kota Pulau Sumatra). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 679–692. <https://www.neliti.com/publications/115984/>
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 43–59. <https://doi.org/10.33105/ITREV.V3I1.22>
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskun, M. (2021). ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH. *Prosiding Penelitian Pendidikan Dan Pengabdian* 2021, 1(1), 49–59. <http://prosiding.rcipublisher.org/index.php/prosiding/article/view/111>